



PUTUSAN

Nomor : 282/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

DEDI HANDOKO, SE., Pekerjaan Buruh, beralamat Jalan Krakatau Nomor 21 LK. 26 Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Nicholas Sutrisman, SH., Ellyda Masni, SH., Rapnauli Purba, SH., MH., Wisker Pakpahan, SH., Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor Hukum Law Office Muchtar Pakpahan & Associates yang beralamat di Jalan tanah Tinggi II No. 44 B Jakarta Pusat dan berkantor Cabang di Jalan Dazam Raya Nomor 77 Medan Sumatra Utara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus 13 November 2017, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT**;

LAWAN

1. PT. PELINDO 1 yang berkedudukan di Jalan Krakatau Ujung Nomor 100 Kelurahan Tanjung Mulia kecamatan Medan Deli Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Swandi Hutasoit, SH., M.Hum, M. Yusron, SH., MM, Fadillah Haryono, SH., MH, Sabrina Sitompul, SH., MM, Khairunisa, SH, dan Rizky Prananda T, SH, Bagian Koordinator PMO Bantuan dan Penanganan Hukum PT. Pelabuhan Indoneisa I, Sekretaris PMO Bantuan dan Penanganan Hukum PT. Pelabuhan Indoneisa I, Staf PMO Bantuan dan Penanganan Hukum PT. Pelabuhan Indoneisa I, dan Pelaksana Perikatan dan Legal Drafting PT. Pelabuhan Indonesia I berdasarkan Surat Kuasa



Khusus tanggal 27 November 2017, selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT I;**

2. Koperasi Karyawan Pelabuhan UTPK Belawan yang berkedudukan di Jalan Raya Pelabuhan Gabion Belawan Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Azwir Agus, SH., M.Hum., Binsar Jhonatan Panggabean, SH., Oscar Leonardo S. Tampubolon, SH., dan Putri Handayani Nasution, SH. Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum Azwir, Hadi & Partners yang beralamat di Jalan Glugur No. 43 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2017, selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II;**

3. PT. GARDA PARAHIANGAN yang berkedudukan di Jalan Raya Pelabuhan Gabion Belawan Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili kuasanya Tumidi dan Dedy Sumantri, Bagian Manager Umum PT. Garda Parahiangan dan Manager Operasional PT. Garda Parahiangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2017, selanjutnya di sebut sebagai-----**TERGUGAT III;**

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dalam perkara ini;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dan mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2017 yang dilampiri Anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada tanggal 23 Oktober 2017 dibawah Register Nomor : 282/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; (CD Gugatan tidak ada).

Halaman 2 dari 52
Putusan PHI Nomor :282/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



1. Bahwa Penggugat adalah buruh yang bekerja di areal dan dibidang produksi Tergugat -1 I.c. PT.Pelindo-1 tepat-nya di areal pelabuhan belawan melalui Tergugat – 2 ic. Koperasi Karyawan Pelabuhan UTPK Belawan;

Dimana Penggugat memiliki KETERANGAN HUBUNGAN KERJA, JABATAN TERAKHIR DAN MENERIMA UPAH sebagai berikut :

HENDRA PRASETYA	Mulai Kerja sejak	01-07-2013
	Jabatan Terakhir	MEKANIK
	Gaji Terakhir/Bulan	Rp. 2.721.255

2. Bahwa selama Penggugat bekerja kepada Tergugat-1, Penggugat SELALU BEKERJA DENGAN BAIK DAN PENUH TANGGUNG JAWAB kepada Tergugat-1;

3. Bahwa selama penggugat bekerja kepada Tergugat-1 tersebut, Tergugat-1 melalui Tergugat-2 MEMPEKERJAKAN PENGGUGAT DENGAN MELEBIHI JAM KERJA SETIAP MINGGU TANPA MEMBERIKAN UPAH LEMBUR;

hal ini bertentangan dengan Pasal 77 ayat (2) jo Pasal 78 ayat (1) Undang-undang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, tanpa membayar upah lembur penggugat ;

PADAHAL KETENTUAN TENTANG WAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH KERJA LEMBUR DIATUR DALAM UNDANG –UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PASAL 78 AYAT (2),(4), PASAL 85 DAN LEBIH LENGKAPNYA DIATUR DALAM KEPMENAKERTRANS NO.102/MEN/VI/2004 MENGENAI WAKTU DAN UPAH KERJA LEMBUR.

BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, TERGUGAT-1 BERKEWAJIBAN MELAKUKAN PEMBAYARAN UPAH LEMBUR YANG TIDAK DIBAYARKAN (KEBELAKANG) KEPADA PARA PELAPOR;

4. Bahwa PERMASALAHAN DIAWALI KETIKA PENGGUGAT BERSAMA RATUSAN BURUH YANG BEKERJA UNTUK KEPENTINGAN PRODUKSI TERGUGAT I MEMBENTUK SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA TINGKAT PERUSAHAAN DAN MENUNTUT HAK-HAK NORMATIF antara lain :

- Dugaan Permasalahan Status Seluruh Buruh di Koperasi karyawan pelabuhan UPTK Belawan ;



- Dugaan Permasalahan Kekurangan Upah dari tahun 2012 s.d tahun 2015 ;
- Dugaan Permasalahan Kekurangan Upah Lembur dari tahun 2012 s.d tahun 2015;
- Dugaan Permasalahan BPJS Kesehatan;
- Dugaan Permasalahan BPJS Ketenagakerjaan;
- Dugaan Permasalahan Upah Berkala;
- Jam Kerja;
- Dugaan Permasalahan Pendaftaran Tenaga kerja di Instansi ketenagakerjaan;
- Status Hubungan Koperasi karyawan pelabuhan UPTK Belawan dengan PT.Pelindo 1 ;
- Status keberadaan Koperasi karyawan pelabuhan UPTK Belawan dari Sudut pandang Hukum yang berlaku;
- Dugaan Permasalahan Hak-hak Normatif lainnya;

dimana penggugat bersama sejumlah buruh tergugat i melalui serikat buruh sejahtera indonesia (sbsi) mengirimkan undangan birpartit (secara tertulis) kepada tergugat-1 dan tergugat-2. namun, tidak mendapatkan tanggapan;

dikarenakan tidak mendapatkan tanggapan, sehingga penggugat bersama sejumlah buruh kembali berupaya menyelesaikan secara bipartit (secara tertulis) kepada tergugat-1 dan tergugat-2. namun, tetap tidak mendapatkan tanggapan;

dikarenakan juga undangan birpartit 1 dan undangan birpartit ii penggugat tidak mendapatkan tanggapan (gagal-nya perundingan). maka, penggugat bersama sejumlah buruh memutuskan melakukan aksi mogok kerja damai pada tanggal 10 febuari 2016 di pt.pelindo 1 (belawan) yang terlebih dahulu didahului oleh surat-surat sebagaimana amanat peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

dimana dalam aksi mogok kerja tersebut, penggugat dan ratusan anggota pk sbsi yang bekerja di wilayah kerja pt.pelindo 1 (belawan) ditemui humas pt.pelindo -1, perwakilan pt.pelindo -1 yang menyampaikan pada inti-nya :“agar kira-nya perwakilan ratusan anggota pk sbsi yang bekerja di wilayah kerja pt.pelindo 1 (belawan) dapat mempersiapkan waktu berunding pada hari jumat ,12 febuari 2016”

atas hal tersebut, penggugat dan ratusan anggota pk sbsi yang bekerja di wilayah kerja pt.pelindo 1 (belawan) menyetujui dan membubarkan aksi mogok kerja damai tersebut;



ternyata sejak aksi mogok kerja damai tersebut berakhir, penggugat dan sebahagian besar anggota pk sbsi yang bekerja di wilayah kerja pt.pelindo 1 (belawan) tidak dipekerjakan;

atas tindakan tersebut, penggugat dan ratusan anggota pk sbsi yang tidak dipekerjakan tersebut tetap bersabar menunggu janji humas pt.pelindo -1 – perwakilan pt.pelindo -1 tanpa melakukan tindakan protes apapun;

dimana penggugat dan sebahagian besar anggota pk sbsi yang bekerja di wilayah kerja pt.pelindo 1 (belawan) yang tidak dipekerjakan tersebut tetap masuk seperti biasa walaupun tidak dikasih bekerja;

pada hari jumat, 12 febuari 2016 bertempat di rumah makan roda baru yang beralamat jl.gunung krakatau medan (simpang bilal) telah terjadi pertemuan antara penggugat, perwakilan buruh / anggota pk sbsi yang bekerja di wilayah kerja pt.pelindo 1 belawan, perwakilan dinas sosial dan tenaga kerja kota medan (±4 orang), perwakilan pt.pelindo -1 (±4 orang) serta turut dihadiri sejumlah petugas kepolisian dari polres pelabuhan belawan.

dalam pertemuan tersebut , perwakilan pt.pelindo -1 (bapak m.eriansyah) menyampaikan yang inti-nya meminta waktu 7 hari dalam rangka menanggapi seluruh tuntutan penggugat dan ratusan anggota pk sbsi yang bekerja di wilayah kerja pt.pelindo 1 (belawan) ;

dimana sejak pertemuan tersebut penggugat dan sebahagian besar anggota pk sbsi yang awalnya tidak dipekerjakan di wilayah kerja pt.pelindo 1 (belawan) tersebut telah dipekerjakan kembali ;

Tetapi sampai dengan tanggal 07 Maret 2016 (23 hari sejak pertemuan terakhir), pt.pelindo -1 tidak pernah memenuhi hal yang disampaikan dalam pertemuan terakhir (menanggapi seluruh tuntutan ratusan anggota pk sbsi yang bekerja di wilayah kerja pt.pelindo 1) ;

akhirnya, penggugat melimpahkan permasalahan pelanggaran hak-hak normatif kepada kepala dinas tenaga kerja kota medan cq.pengawas / pegawai penyidik negeri sipil kota medan untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

namun, sampai dengan akhir desember tahun 2016 diduga tidak pernah ditindaklanjuti pengawas / pegawai penyidik negeri sipil dinas tenaga kerja kota medan sesuai peraturan yang berlaku;

tiba-tiba akhir desember 2016, tergugat 1 melalui tergugat 2 mengumumkan kepada penggugat dan seluruh buruh yang bekerja

*Halaman 5 dari 52
Putusan PHI Nomor :282/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn*



kepada tergugat 1 melalui tergugat-2 sejak awal tahun 2017 akan dipindahkan ke perusahaan lain, tetapi tetap bekerja untuk kepentingan produksi tergugat-1, bagi yang menolak tidak lagi dapat bekerja;

Penggugat dan sebahagian besar anggota pk sbpsi telah berupaya melakukan Protes kepada Tergugat 1 dan Tergugat-2. Namun, TIDAK mendapatkan tanggapan apapun juga;

sehingga penggugat bersama buruh lainnya yang bekerja kepada tergugat-1 melalui tergugat-2 (yang bergabung ke sbpsi) melakukan aksi unjuk rasa. namun, tergugat-2 tetap bersikeras dengan alasan keputusan tersebut sudah menjadi keputusan tergugat-1;

dikarenakan tidak sepakat dan protes atas keputusan tersebut, penggugat bersama dengan ratusan anggota SBSI (Buruh yang bekerja kepada Tergugat-1 melalui Tergugat 2) melakukan aksi long march (jalan kaki) dari Medan menuju Istana Merdeka (Istana Presiden Republik Indonesia- Ir.H.Joko Widodo);

aksi long march (jalan kaki) dari Medan menuju Istana Merdeka (Istana Presiden Republik Indonesia- Ir.H.Joko Widodo) ditempuh perlapor selama ±40 hari tanpa ada tanggapan apapun dari Tergugat-1 dan Tergugat-2 (Berangkat dari Kantor PT.Pelindo 1 tanggal 20 Januari 2017); Sesampainya di depan Istana Merdeka (Istana Presiden Republik Indonesia- Ir.H.Joko Widodo), Penggugat bersama buruh lainnya melakukan aksi menginap selama ±10hari tanpa mendapatkan tanggapan apapun dari Tergugat-1 ataupun Tergugat-2;

5. Bahwa selama menginap didepan Istana Merdeka Jakarta tersebut, telah terjadi perundingan yang difasilitasi oleh sekretaris Negara Republik Indonesia yang dihadiri Perwakilan penggugat dan ratusan buruh PK SBSI, Perwakilan Kementerian BUMN dan perwakilan PT.Pelindo 1. Namun, tidak mendapatkan hasil apapun ;

6. Bahwa setelah puluhan hari menginap depan Istana Merdeka (Istana Presiden Republik Indonesia - IR.H.JOKO WIDODO), akhirnya terjadi pertemuan antara kuasa Penggugat, Ketua Umum SBSI, Tergugat-I, dan Tergugat II Di Jakarta dan menghasilkan kesepakatan bersama antara lain :

- Bahwa Kopkarpel akan memenuhi kewajiban terkait hak-hak normatif buruh kopkarpel yang besaran atau skala dan



perinciannya akan menjadi objek perundingan berdasarkan prinsip keadilan bagi buruh dan kemampuan kopkarpel;

- Bahwa Terkait tuntutan buruh eks kopkarpel untuk diangkat menjadi pegawai organik pelindo 1 ,pihak pelindo 1 menyatakan untuk menjadi pegawai organik harus melalui prosudur seleksi penerimaan secara formal ,sedangkan eks buruh kopkarpel akan menempuh jalur hukum;
- Bahwa pelindo 1 akan memastikan buruh yang tersisa (±160 orang akan terserap di lingkungan perusahaan PT.Pelindo-1 hingga tercapai putusan hukum;
- Bahwa pelindo 1 akan memfasilitasi kepulauan buruh eks kopkarpel dari jakarta ke Medan;
- Bahwa buruh eks kopkarpel dan sbisi akan menjaga suasana kerja yang positif dan profesionalisme ketika ditempatkan kembali bekerja di lingkungan PT.Pelindo1;

Atas kesepakatan bersama tersebut, penggugat bersama ratusan buruh yang melakukan aksi long march Medan menuju jakarta bersuka cita dan berharap mendapatkan jalan keluar terbaik atas permasalahan yang ada ;

7. Bahwa ternyata sekembali nya Penggugat di Medan dan hendak bekerja kembalu seperti biasa, Tergugat-1 melalui Tergugat-2 mengulur-ulur waktu tanpa alasan;

Bahkan secara tiba-tiba, Tergugat-2 menerbitkan surat pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat dan ratusan buruh serta menembuskan surat tersebut ke Instansi – Instansi;

8. Bahwa pelapor melakukan protes karena tidak diperkerjakan dan akhirnya Penggugat dan ratusan buruh kembali diperkerjakan tetapi tidak di posisi semula & tidak lagi dengan gaji yang sesuai sebelumnya yang sesuai sebelumnya.

seolah-olah Penggugat bekerja kepada PT.Garda Parahiangan, dimana fakta-nya Penggugat tetap bekerja di areal wilayah kerja Tergugat 1 tetapi tidak lagi bekerja di posisi semula;

9. Bahwa untuk membicarakan secara kekeluargaan, Penggugat telah melakukan berulang kali undangan perundingan Birpartit dan Klarifikasi ke Tergugat-1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5. Namun,



tidak ditanggapi atau setidaknya tidak adanya penyelesaian atas permasalahan yang ada;

10. Bahwa berhubungan musyawarah secara kekeluargaan tidak menemui penyelesaian, sehingga Penggugat bersama ratusan buruh yang bernasib sama dengan Penggugat mengajukan pelimpahan permasalahan ke Dinas Tenaga Kerja Kota medan untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku;

Dikarenakan juga penyelesaian secara Tripartit (mediasi) tersebut tidak selesai juga bahkan Tergugat tidak pernah menghadiri panggilan Mediator Dinas Sosial dan Tenaga kerja Kota Medan. Maka, Dinas Tenaga Kerja Kota Medan mengeluarkan Surat Nomor: 567/1773/DKKM/2017 tanggal 21 Juli 2017 Perihal Anjuran;

11. Bahwa pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan ataupun pengalihan hubungan kerja ke perusahaan lain yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan serta di duga mengaburkan hubungan kerja antara penggugat dengan tergugat I;

Dimana tindakan Tergugat II yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak kepada Penggugat serta tanpa Penetapan Lembaga Penyelesaian perselisihan hubungan Industrial tersebut adalah telah jelas merugikan Penggugat khususnya mengakibatkan hilangnya mata pencaharian Penggugat & tidak jelasnya status hubungan kerja Penggugat;

Apalagi Pemutusan hubungan kerja tersebut tidak benar adanya, mengingat penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan tetap dan masih bekerja untuk kepentingan Produksi PT.PELINDO 1;

Tindakan tergugat II ataupun pihak tergugat lainnya yang semata-mata untuk mengaburkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I adalah bertentangan dengan Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan;

Oleh karena itu gugatan Penggugat adalah cukup beralasan hukum untuk diajukan ke Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan dikabulkan oleh majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

12. Bahwa dikarenakan status hubungan kerja antar penggugat dengan Perusahaan Kopkarpel UPTK belawan, maupun dengan PT.Nabila Cahya

Halaman 8 dari 52

Putusan PHI Nomor :282/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Abdi, PT.Garda Parahiangan, PT.Mardiah Abadi Sentosa, demi hukum beralih menjadi tanggung jawab PT.Pelindo I Belawan. Sesuai pasal 7 ayat 2 Per-19/Men/2012. Dengan demikian segala hak dan kewajiban antara penggugat yang timbul akibat hubungan kerja tersebut menjadi tanggung jawab PT.Pelindo I Belawan.Maka,Patut dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menyatakan Penggugat adalah buruh yang bekerja kepada Tergugat I Ic. PT.Pelindo 1 ;

13. Bahwa dikarenakan kesepakatan bersama yang dilakukan penggugat ,tergugat I dan tergugat II didasarkan adalah dengan akal sehat,tanpa paksaan dan dengan prinsip sesuai Pancasila yang diamanatkan oleh Undang-undang yang berlaku.Maka,Patut dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menyatakan surat kesepakatan bersama tanggal 8 Maret 2017 adalah sah dan berharga;
14. Bahwa mengingat demi hukum Penggugat adalah buruh yang bekerja kepada tergugat I.Maka,Patut dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menyatakan surat Koperasi Karyawan Pelabuhan UTPK Belawan NO.055/S.KET/KOP-UTPK/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 yang diterbitkan Tergugat II adalah tidak sah;
15. Bahwa Mengingat demi hukum Penggugat adalah buruh yang bekerja kepada Tergugat I. Maka,Patut dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk memerintahkan Terguga I menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat sebagai buruh PT.Pelindo 1;
16. Bahwa Mengingat demi hukum Penggugat adalah buruh yang bekerja kepada Tergugat I .Maka,Patut dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menyatakan penurunan gaji yang dilakukan Para Tergugat kepada Penggugat tidak sah;
17. Bahwa Mengingat demi hukum Penggugat adalah buruh yang bekerja kepada Tergugat I dan gaji penggugat diturunkan oleh pihak yang tidak berwenang untuk hal tersebut.Maka,Patut dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk memerintahkan Tergugat I untuk setiap bulannya melakukan pembayaran gaji Penggugat sebesar Rp.2.721.255
18. Bahwa Mengingat demi hukum Penggugat adalah buruh yang bekerja kepada Tergugat I dan penggugat dipindahkan ke posisi jabatan yang

Halaman 9 dari 52
Putusan PHI Nomor :282/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



tidak sesuai dengan keahlian penggugat serta secara sepihak. Maka, Patut dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk memrintahkan Tergugat I untuk memperkerjakan kembali Penggugat di posisi semula sebagai Jabatan Mekanik;

19. Bahwa mengingat pada bulan febuari 2017 dan bulan maret 2017 tergugat I tidak membayarkan gaji penggugat padahal penggugat tetap berkeinginan bekerja seperti biasa tetapi tidak diijinkan.

Maka, Patut dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk Memerintahkan Tergugat I melakukan pembayaran gaji penggugat pada bulan Febuari dan Maret 2017 dengan total sebesar Rp.5.442.510,- (lima juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus sepuluh rupiah) dengan perincian

Febuari 2017 = Rp. 2.721.255

Maret 2017 = Rp. 2.721.255

20. Bahwa Untuk menghindari tergugat lalai ataupun tidak menghiraukan putusan perkara aquo. Maka patut demi hukum dan keadilan dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/hari atas kelalaiannya melaksanakan isi putusan ini;
21. Bahwa demi efektifitas Gugatan Penggugat dalam Perkara aquo tidak nihil dan hampa adanya, dengan ini di mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) untuk lebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaq) teristimewa untuk harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I yang akan disebutkan kemudian dalam perkara ini;
22. Bahwa oleh karenanya Gugatan Penggugat ini adalah didasarkan oleh Bukti yang cukup otentik dan ekseptional, yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat adalah beralasan menurut hukum apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan Industrial Medan agar menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu serta merta meskipun ada upaya verzet maupun kasasi (uit voo bij voorad);
23. Bahwa oleh karenanya Gugatan Penggugat ini tidak mencapai RP.150.000.000,- dalam tuntutan-nya, maka, Maka patut demi hukum dan keadilan dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 10 dari 52
Putusan PHI Nomor :282/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri cq. Pengadilan Hubungan industrial jo. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara untuk hadir dalam persidangan yang telah ditentukan untuk itu, serta mengambil keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (Consevoir Beslaq) yang dilakukan dalam perkara ini sah;
3. Menyatakan penggugat adalah buruh yang bekerja kepada tergugat I Ic. PT.Pelindo 1;
4. Memerintahkan Tergugat I Untuk Menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat Sebagai Buruh Pt.Pelindo 1;
5. Menyatakan Surat Kesepakatan Bersama Tanggal 8 Maret 2017 Adalah Sah Dan Berharga;
6. Menyatakan Surat Koperasi Karyawan Pelabuhan Utpk Belawan No.055/S.KET/KOP-UTPK/II/2017 Tanggal 10 Maret 2017 Yang Diterbitkan Tergugat II Adalah Tidak Sah;
7. Memerintahkan Tergugat I Untuk Mempekerjakan Kembali Penggugat Di Posisi Semula Sebagai Jabatan Mekanik;
8. Menyatakan Penurunan gaji yang dilakukan para tergugat kepada penggugat tidak sah;
9. Memerintahkan Tergugat I untuk setiap bulan –nya melakukan pembayaran gaji penggugat sebesar Rp. 2.721.255;
10. Memerintahkan Tergugat I melakukan pembayaran gaji penggugat pada bulan Febuari dan Maret 2017 dengan total sebesar Rp.5.442.510,- (lima juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus sepuluh rupiah)
11. Menghukum Tergugat Membayar Uang Paksa (Dwangsom) Sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)/Hari Atas Kelalaiannya Melaksanakan Isi Putusan Ini;
12. Menyatakan Keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu serta merta meskipun ada upaya Verzet maupun kasasi (Uit Voo Bij Voorad);
13. Membebankan Biaya Perkara Kepada Negara;

Demikian gugatan ini disampaikan dihadapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan c/q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan **Penggugat** hadir kuasanya Nicholas Sutrisman, SH., Ellyda Masni, SH., Rapnauli Purba, SH., MH., Wisker Pakpahan, SH., Advokat/Penasehat Hukum

Halaman 11 dari 52
Putusan PHI Nomor :282/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



pada kantor Hukum Law Office Muchtar Pakpahan & Associates yang beralamat di Jalan tanah Tinggi II No. 44 B Jakarta Pusat dan Berkantor cabang di Jl. Dazam Raya No. 77 Medan Sumatera Utara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2017, kemudian untuk, **Tergugat I** hadir kuasanya Swandi Hutasoit, SH., M.Hum, M. Yusron, SH., MM., Fadillah Haryono, SH., MH, Sabrina Sitompul, SH., MM., Khairunisa, SH., dan Rizky Prananda T, SH., Bagian Koordinator PMO Bantuan dan Penanganan Hukum PT. Pelabuhan Indoneisa I, Sekretaris PMO Bantuan dan Penanganan Hukum PT. Pelabuhan Indoneisa I, Staf PMO Bantuan dan Penanganan Hukum PT. Pelabuhan Indoneisa I, dan Pelaksana Perikatan dan Legal Drafting PT. Pelabuhan Indonesia I, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2017, untuk **Tergugat II** hadir kuasanya Azwir Agus, SH., M.Hum., Binsar Jhonatan Panggabean, SH., Oscar Leonardo S. Tampubolon, SH., dan Putri Handayani Nasution, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum Azwir, Hadi & Partners yang beralamat di Jalan Glugur No. 43 Medan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2017, dan untuk **Tergugat III** hadir kuasanya Tumidi dan Dedy Sumantri, Bagian Manager Umum PT. Garda Parahiangan dan Manager Operasional PT. Garda Parahiangan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat I telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 11 Desember 2017 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Sebelum Tergugat I membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terdapat dalam pokok perkara, Tergugat I terlebih dahulu akan menyampaikan eksepsi dalam perkara aquo;

Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang Tergugat I akui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini.

*Halaman 12 dari 52
Putusan PHI Nomor :282/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn*



Dalam jawaban ini, Tergugat I mengajukan eksepsi dengan argumentasi serta dalil-dalil sebagaimana diuraikan di bawah ini;

A. Tentang Hukumnya

1. Bahwa sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Perselisihan Hubungan Industrial adalah Perbedaan Pendapat yang mengakibatkan pertentangan Antara Pengusaha, Gabungan Pengusaha dengan pekerja/Buruh atau serikat Pekerja/Serikat Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/buruh dalam suatu perusahaan.
2. Bahwa PT Pelindo I ic Tergugat I adalah Perusahaan Pemberi Pekerjaan yang bekerjasama dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang dikategorikan sebagai Pengusaha, sedangkan Penggugat adalah buruh/pekerja kepada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/buruh sampai dengan 31 Desember 2016 dan tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat I sebagai Pemberi Pekerjaan.
3. Bahwa hubungan hukum Penggugat selaku buruh/pekerja sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah dengan Tergugat-2 selaku Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/buruh sedangkan terhitung mulai April 2017 adalah dengan Tergugat-3 selaku Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/buruh.
4. Dengan demikian, sudah sepatutnya demi hukum Tergugat I harus dikeluarkan dalam Perkara aquo sebab tidak dikategorikan sebagai subjek dalam perselisihan hubungan Industrial ini.

B. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa Penggugat dalam positanya halaman 1 angka 1 menyatakan:
“ Bahwa penggugat adalah buruh yang bekerja di areal dan dibidang produksi Tergugat I Ic PT Pelindo I tepatnya di areal pelabuhan Belawan melalui Tergugat 2 ic Koperasi Karyawan Pelabuhan UTPK Belawan...dengan jabatan terakhir tally”.
2. Bahwa selanjutnya dalam positanya angka 11 menyatakan:

Halaman 13 dari 52
Putusan PHI Nomor :282/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



“bahwa mengingat pengalihan hubungan dari Pemberi Kerja dalam hal ini Tergugat 1 kepada Tergugat 2 ataupun kepada Tergugat 3 tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No 19 tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebahagian pelaksanaan pekerjaan, maka patut dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk Menyatakan tindakan Tergugat 1 yang mengalihkan hubungan kerja Penggugat kepada Tergugat 2 ataupun Tergugat 3 adalah tidak sah”

3. Bahwa selanjutnya dalam positanya angka 13 menyatakan:
“bahwa dikarenakan status hubungan kerja antar Penggugat dengan Tergugat 2 ataupun kepada Tergugat 3, demi hukum beralih menjadi tanggung jawab Tergugat 1 (karena melanggar amanat Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No 19 tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebahagian pelaksanaan pekerjaan), dengan demikian segala hak dan kewajiban antara Penggugat yang timbul akibat hubungan kerja tersebut menjadi tanggungjawab Tergugat 1. maka patut dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk Menyatakan status hubungan kerja Penggugat menjadi tanggung jawab pemberi kerja Tergugat 1.”
4. Bahwa dalil Penggugat dimaksud tidak jelas dan kabur sebab tidak jelas perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat 1 yang melanggar syarat-syarat Penyerahan Sebahagian Pelaksanaan Pekerjaan yang menyebabkan tindakan Tergugat 1 tidak sah dan status hubungan kerja Penggugat menjadi tanggung jawab pemberi kerja Tergugat 1.
5. Bahwa sesuai Yurisprudensi MA RI No. 6 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo. No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 dimana

Halaman 14 dari 52
Putusan PHI Nomor :282/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna”.

6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo sama sekali tidak memiliki dasar yang mendukung dalil Penggugat, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas demikian jelas dan nyata bahwa gugatan tersebut belum memenuhi syarat diajukannya gugatan ke Pengadilan hubungan industrial, oleh karena itu Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

Tergugat I mohon kiranya jawaban dalam pokok perkara aquo dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian eksepsi Tergugat I di atas yang secara mutatis mutandis tidak dapat dipisahkan.

Dalam uraian pada bagian ini, Tergugat I akan menyampaikan bantahan terhadap seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang Tergugat I akui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini.

Adapun dalil-dalil selengkapnya yang Tergugat I sampaikan dalam pokok perkara ini adalah sebagai berikut:

A. Mengenai Hubungan Hukum

1. Bahwa atas posita gugatan Penggugat sebagaimana poin 2 s.d poin 9, Tergugat I tidak akan menanggapinya sebab posita-posita tersebut hanya usaha Penggugat untuk membenarkan tindakan-tindakan Penggugat dan Penggugat telah melakukan pengaburan fakta-fakta hukum serta mencederai hukum guna kepentingan pribadi sehingga gugatan ini harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

2. Bahwa selanjutnya dalam positanya angka 11 menyatakan:

“bahwa mengingat pengalihan hubungan dari Pemberi Kerja dalam hal ini Tergugat I kepada Tergugat 2 ataupun kepada Tergugat 3 tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan

Halaman 15 dari 52
Putusan PHI Nomor :282/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Republik Indonesia khususnya Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No 19 tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebahagian pelaksanaan pekerjaan, maka patut dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk Menyatakan tindakan Tergugat I yang mengalihkan hubungan kerja Penggugat kepada Tergugat 2 ataupun Tergugat 3 adalah tidak sah”

3. Bahwa selanjutnya dalam positanya angka 13 menyatakan:
“bahwa dikarenakan status hubungan kerja antar Penggugat dengan Tergugat 2 ataupun kepada Tergugat 3, demi hukum beralih menjadi tanggung jawab Tergugat 1 (karena melanggar amanat Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No 19 tahun 2012 tentang syarat-syarat Penyerahan Sebahagian pelaksanaan pekerjaan), dengan demikian segala hak dan kewajiban antara Penggugat yang timbul akibat hubungan kerja tersebut menjadi tanggungjawab Tergugat I. maka patut dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk Menyatakan status hubungan kerja Penggugat menjadi tanggung jawab pemberi kerja Tergugat I.”
4. Bahwa sebelumnya Tergugat I akan menjelaskan kedudukan hukum dari Tergugat I dalam perkara aquo.
5. Bahwa sebagaimana Tergugat I jelaskan dalam bagian eksepsi, Tergugat I merupakan Perusahaan Pemberi Kerja Borongan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan yaitu pekerjaan penunjang yang salah satunya adalah pemborongan pekerjaan tally pada Belawan Internasional Container Terminal.
6. Bahwa Tergugat I dahulunya menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan yaitu pekerjaan penunjang yang salah satunya adalah



pemborongan pekerjaan tally pada Belawan Internasional Container Terminal kepada Tergugat II.

7. Bahwa dasar penyerahan dimaksud adalah terakhir dengan perjanjian berdasarkan Perjanjian No B.XIV-29/BICT-KP.31 tanggal 09 September 2016 yaitu jasa pemborongan pekerjaan tally pada Belawan Internasional Container Terminal dan berakhir pada 31 Desember 2016.
8. Bahwa Penggugat dahulunya merupakan pekerja dari Tergugat II s.d 31 Desember 2016 dan menerima gaji/upah dan hak-hak lainnya dari Tergugat II.
9. Bahwa Tergugat I tidak pernah memberikan upah/gaji maupun hak-hak lainnya kepada Penggugat sebelum ataupun sesudah 31 Desember 2016.
10. Dengan demikian sudah jelas dan terang mengenai kedudukan hukum Tergugat I dan antara Penggugat dengan Tergugat I tidak ada hubungan hukumnya dan gugatan ini harusnya tidak ditujukan kepada Tergugat I.
11. Bahwa Penggugat pada posita gugatannya poin 10 mendalilkan bahwa :
"pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan ataupun pengalihan hubungan kerja ke perusahaan lain yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat telah melanggar Ketentuan UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan serta diduga bertujuan mengaburkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I...dst"
12. Bahwa selanjutnya Penggugat dalam posita gugatannya poin 16 mendalilkan bahwa "Bahwa dikarenakan status hubungan kerja antar Penggugat dengan Tergugat-2 maupun dengan Tergugat-3 demi hukum beralih menjadi tanggung jawab Tergugat I (karena melanggar amanat Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No 19 tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebahagian pelaksanaan pekerjaan), dengan demikian segala hak dan kewajiban antara Penggugat yang timbul akibat hubungan kerja tersebut menjadi tanggungjawab Tergugat I. Maka patut dimohonkan kepada Majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk

Halaman 17 dari 52
Putusan PHI Nomor :282/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



menyatakan Penggugat adalah buruh dan ataupun pegawai yang bekerja kepada Tergugat I Ic PT Pelindo I (Persero) dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu...dst”.

13. Bahwa sebagaimana Penggugat jelaskan bahwa antara Tergugat I dengan Tergugat II terdapat hubungan hukum yaitu jasa pemborongan pekerjaan tally pada Belawan Internasional Container Terminal yang terakhir berdasarkan Perjanjian No B.XIV-29/BICT-KP.31 tanggal 09 September 2016.
14. Untuk memenuhi jasa pemborongan pekerjaan tally pada Belawan Internasional Container Terminal, Tergugat II mempekerjakan Penggugat dengan posisi terakhir tally.
15. Bahkan Penggugat melakukan penyesatan fakta bahwasanya Tergugat II melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat sedangkan faktanya Tergugat II tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat namun Tergugat II mengalihkan tenaga kerja kepada Tergugat III.
16. Bahwa sesuai Pasal 3 ayat (2) huruf c Per-19/Men/2012, pekerjaan yang dapat diserahkan kepada Perusahaan Penerima Pemborongan harus memenuhi syarat merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan sesuai dengan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan.
17. Bahwa Tergugat I merupakan Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No KP 133 tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan sehingga tergabung dalam asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia.
18. Bahwa Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (Asbupi) adalah asosiasi yang didirikan berdasarkan Akta No 1 tanggal 30 Oktober 2013 yang telah disahkan oleh Kemenkumham RI No AHU-257.AH.01.07 tahun 2013 tanggal 29 November 2013.
19. Bahwa maksud dibentuknya Asbupi adalah untuk menghimpun pelaku badan usaha Pelabuhan yang diusahakan secara komersil dalam 1 wadah organisasi nirlaba dan yang tujuannya salah satunya adalah

Halaman 18 dari 52
Putusan PHI Nomor :282/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



membantu, memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam implementasi outsourcing.

20. Bahwa sesuai amanat dan implementasi Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Permenakertrans No 19 tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan lain, maka Asosiasi telah mengatur mengenai pemilahan terhadap pekerjaan pokok dan penunjang berdasarkan alur proses bisnis di lingkungan Badan Usaha Pelabuhan Indonesia.
21. Bahwa asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia No HK.56/1/1/AsBUPI-13 tanggal 11 Desember 2013 tentang Penetapan Alur Proses Bisnis, Pekerjaan Pokok dan Penunjang di Lingkungan Badan Usaha Pelabuhan Indonesia.
22. Bahwa Surat Keputusan Dewan Pengurus Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia No HK.56/1/1/AsBUPI-13 tanggal 11 Desember 2013 tentang Penetapan Alur Proses Bisnis, Pekerjaan Pokok dan Penunjang di Lingkungan Badan Usaha Pelabuhan Indonesia tersebut telah didaftarkan dan dilaporkan ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan melalui surat General Manager Belawan International Container Terminal No KP.30/29/6/BICT-13 tanggal 24 Desember 2013 perihal Pelaporan Jenis Pekerjaan Penunjang Dalam Pemborongan Pekerjaan.
23. Bahwa atas surat dimaksud, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan telah mengeluarkan bukti pelaporan jenis pekerjaan penunjang No 560/141/DSTKM/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang pada pokoknya menyatakan disnaker kota Medan telah menerima laporan mengenai jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan melalui pemborongan pekerjaan dan pelaporan tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan alur kegiatan kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang dikeluarkan oleh asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia.
24. Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pengurus Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia No HK.56/1/1/AsBUPI-13 tanggal 11 Desember 2013 tersebut diatas, kegiatan tally adalah termasuk kegiatan penunjang tidak langsung jasa kepelabuhan yang dapat diserahkan melalui pemborongan pekerjaan .

Halaman 19 dari 52
Putusan PHI Nomor :282/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



25. Bahwa tindakan Tergugat I selaku pemberi kerja dengan memberikan jasa pemborongan pekerjaan tally pada Belawan Internasional Container Terminal sebelumnya kepada Tergugat II adalah sudah sesuai dan berdasar hukum serta dilindungi oleh Undang-Undang.
26. Bahwa sesuai Pasal 66 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No 19 tahun 2012 dinyatakan bahwa penyedia jasa pekerja/buruh adalah penyedia jasa pekerja/buruh merupakan suatu bentuk usaha yang berbadan hukum.
27. Bahwa Tergugat II merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Koperasi Karyawan Pelabuhan Unit Usaha Terminal Petikemas dari Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan telah terdaftar dalam buku daftar umum Departemen Koperasi RI No 430/BH/KDK-2.17/II/2000 tanggal 04 Februari 2000.
28. Bahwa dengan demikian posita Penggugat pada poin 17 menyatakan:
"Bahwa mengingat demi hukum Penggugat adalah buruh yang bekerja kepada Tergugat I, Maka patut dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk Menghukum Tergugat I untuk menerbitkan Surat Pengangkatan Penggugat sebagai buruh dan ataupun pegawai Tergugat I Ic PT Pelabuhan Indonesia I sejak putusan ini dibacakan".
Adalah tidak benar sebab pekerjaan tally pada Belawan Internasional Container Terminal bukan merupakan pekerjaan pokok dari Jasa Kepelabuhan.
28. Bahwa terkait keinginan Penggugat untuk menjadi Pegawai PT Pelindo I maka posita tersebut jelas sangat tidak berdasar hukum dan menyesatkan fakta dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini haruslah menolak dan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebab PT Pelindo I telah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh tenaga kerja outsourcing yang bekerja di Lingkungan PT Pelindo I untuk menjadi Pegawai PT Pelindo I dan telah diumumkan di media elektronik, website serta sosialisasi ke cabang-cabang di Lingkungan PT Pelindo I .



29. Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi No KP.30/22/II/PI-16.TU tanggal 01 Juli 2006 tentang Tata Cara Rekrutmen dan Seleksi Penerimaan Pegawai PT Pelindo I untuk menjadi Pegawai PT Pelindo I, seseorang dapat menjadi Pegawai PT Pelindo I apabila telah mendaftar dan lulus dalam ujian yang diselenggarakan.
30. Bahwa berdasarkan hasil rekrutmen khusus pegawai outsourcing pada bulan februari tahun 2017, Penggugat tidak tercantum dalam pengumuman hasil seleksi untuk menjadi calon Pegawai PT Pelindo I, sehingga dengan demikian sudah sangat tepat bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
31. Bahwa terkait dengan posita gugatan Penggugat pada poin 18 "...dst untuk memeritahkan Tergugat I untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi semula sebagai tally".

Adalah tuntutan yang sangat keliru dan tidak berdasar sebab sebagaimana Tergugat I jelaskan diatas bahwa tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I.

32. Bahwa Penggugat saat ini bekerja di PT Garda Parahiangan (ic Tergugat 3) sehingga wewenang untuk mempekerjakan Penggugat pada posisi apapun adalah wewenang dan tanggungjawab Tergugat 3.

B. Mengenai dwangsom dan Sita Jaminan

1. Bahwa dengan telah terbantahkannya semua tuntutan pokok Penggugat maka gugatan Penggugat pada poin 21 yaitu meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) teristimewa terhadap harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat I yang akan disebutkan kemudian dalam perkara ini harus dinyatakan tidak berdasar dan patut dikesampingkan
2. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa permohonan sita jaminan dan Putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak berdasar hukum dan oleh karena itu, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil bantahan serta fakta hukum yang Tergugat I uraikan di atas, telah terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak benar dan tidak



berdasar hukum sehingga layak dan patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dengan demikian, dengan terbantahnya seluruh dalil gugatan Penggugat dan telah terbukti secara sah serta meyakinkan bahwa gugatan Penggugat keliru dan mengada-ada sehingga layak dan patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal diatas dengan ini Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR

Bilamana Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat II telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 11 Desember 2017 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

- Bahwa dalam gugatan halaman 6 (enam) posita angka 9 (sembilan), Penggugat menyatakan :

'bahwa pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan ataupun pengalihan hubungan kerja ke perusahaan lain yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat telah melanggar ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta di duga

Halaman 22 dari 52
Putusan PHI Nomor :282/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



bertujuan mengaburkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I';

- Bahwa kemudian dalam gugatan halaman 9 (sembilan) petitum angka 4 (empat), Penggugat menuntut supaya Majelis Hakim 'Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tergugat 2 kepada Penggugat adalah tidak sah' dan pada petitum angka 5 (lima) Penggugat menuntut supaya Majelis Hakim 'Menyatakan tindakan Tergugat 2 yang mengalihkan hubungan kerja Penggugat kepada Tergugat 3 adalah tidak sah' ;
- Bahwa kedua uraian dalil dalam gugatan Penggugat tersebut diatas saling bertentangan karena antara pemutusan hubungan kerja (PHK) serta pengalihan hubungan kerja sangat berbeda atau mempunyai akibat hukum yang prinsipil berbeda pula, dan tidak jelas diuraikan ketentuan mana dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang telah dilanggar oleh Tergugat II;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak cermat dalam menyusun posita serta petitum gugatan sehingga menjadi saling bertentangan dan/atau tidak jelas (obscuur libel) maka telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menyatakan gugatan Penggugat a quo tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa hal-hal yang telah terurai dalam eksepsi, mohon dianggap secara mutatis mutandis termuat dan diulangi kembali dalam pokok perkara di bawah ini;
- Bahwa Tergugat II secara tegas menolak dan membantah seluruh gugatan Penggugat baik dalil posita maupun dalil petitanya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II;

PENGALIHAN HUBUNGAN KERJA PENGGUGAT TELAH SAH DAN SESUAI KESEPAKATAN

1. Bahwa Tergugat II adalah badan hukum Koperasi yang didirikan dengan Akte Pendirian No.430/BH/KDK-2.17/II/2000 tanggal 4 Februari 2000, dan Tergugat II semula mendapatkan borongan pekerjaan dari Tergugat I di terminal peti kemas Belawan International Container

Halaman 23 dari 52
Putusan PHI Nomor :282/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Terminal (BICT) dan Terminal Peti Kemas Domestik Belawan (TPKDB) berdasarkan perjanjian pemborongan pekerjaan;

2. Bahwa sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.19 tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, maka semua jenis pekerjaan yang diborongan kepada Tergugat II telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan pada Pasal 5 Peraturan Menteri tersebut, yaitu 'Jenis pekerjaan penunjang yang diserahkan telah dilaporkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan kepada instansi bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota tempat Pemborongan dilaksanakan' ;
3. Bahwa berdasarkan peraturan menteri tersebut diatas maka Tergugat I dengan surat No.KP.30/29/G/BICT-13 tanggal 24 Desember 2013, melaporkan jenis-jenis pekerjaan penunjang yang diserahkan melalui pemborongan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Medan yang kemudian menerbitkan Bukti Pelaporan No.560/141/DSTK/2013 tertanggal 27 Desember 2013 dimana semua jenis pekerjaan yang diborongan kepada Tergugat II telah sesuai syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa selanjutnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.19 tahun 2012, menyatakan : 'Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan jasa penunjang perusahaan pemberi kerja', sehingga guna memenuhi ketentuan dimaksud maka Tergugat II yang berbadan hukum Koperasi harus menyesuaikan diri mengurangi kegiatan penyaluran tenaga kerja di tempat usaha Tergugat I ;
5. Bahwa disebabkan Tergugat II tidak lagi mendapatkan pekerjaan borongan dari Tergugat I dan sesuai peraturan menteri diatas maka Tergugat II melakukan musyawarah dan menawarkan solusi yaitu mengalihkan tenaga kerja kepada perusahaan (PT) pengganti yang telah mendapatkan pekerjaan borongan disertai pemberian uang pisah sesuai kesanggupan atau kemampuan keuangan Tergugat II, dan Penggugat tetap mendapatkan fasilitas kerja, upah atau hak-hak normatif lainnya, akan tetapi Penggugat tidak menerima solusi tersebut

*Halaman 24 dari 52
Putusan PHI Nomor :282/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn*



dan bersama sebagian tenaga kerja (buruh) melakukan aksi demonstrasi (unjukrasa) dan mogok kerja;

6. Bahwa setelah Penggugat masuk bekerja kembali kemudian dilakukan lagi aksi unjukrasa yang dilanjutkan dengan kegiatan Long March (jalan kaki) ke Jakarta yang akhirnya melahirkan surat 'Pernyataan Kesepakatan Bersama' tanggal 8 Maret 2017 dimana ternyata pengalihan yang ditawarkan telah diterima secara baik oleh sebahagian besar ex pekerja Tergugat II, kemudian berdasarkan kesepakatan maka diterbitkan surat No.055/S.KET/KOP-UTPK/ II/2017 tanggal 10 Maret 2017, dan untuk memastikan ex pekerja terserap dilingkungan kerja Tergugat I maka Tergugat II bersama pihak terkait (termasuk PK SBSI UTPK Belawan) melakukan alokasi penempatan ex pekerja di perusahaan lain supaya tetap bekerja sebagaimana mestinya ;
7. Bahwa kemudian mengenai angka 2 surat 'Pernyataan Kesepakatan Bersama' tanggal 8 Maret 2017 yang menyatakan 'bahwa terkait tuntutan eks buruh Korkarpel untuk diangkat menjadi pegawai organik Pelindo I, Pihak Pelindo I menyatakan untuk menjadi Pegawai Organik harus melalui prosedur seleksi penerimaan secara formal ...dst' maka Tergugat I juga telah memberikan kesempatan kepada seluruh pekerja outsourcing termasuk Penggugat untuk mengikuti rekrutmen karyawan organik akan tetapi Penggugat ternyata tidak mendaftar atau tidak memenuhi kualifikasi yang disyaratkan oleh Tergugat I;
8. Bahwa dengan demikian pengalihan hubungan kerja Penggugat kepada perusahaan (PT) lain (ic. Tergugat III) yang telah mendapatkan pekerjaan borongan dari Tergugat I disertai uang pisah sesuai kesanggupan atau kemampuan keuangan Tergugat II adalah sah dan sesuai kesepakatan bersama yang telah diterima secara baik oleh Penggugat yang sampai saat ini masih bekerja serta menerima hak-hak normatif dari hubungan kerja dengan perusahaan atau perseroan lain tersebut sehingga tidak benar jika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Penggugat;

TUNTUTAN PEMBAYARAN GAJI PENGGUGAT BULAN FEBRUARI - MARET 2017 TIDAK BERDASARKAN HUKUM

1. Bahwa Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, secara tegas menyatakan 'upah tidak dibayar apabila

*Halaman 25 dari 52
Putusan PHI Nomor :282/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn*



pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan' dan pada Pasal 93 ayat (2) dinyatakan bahwa 'ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila ...dst : (h). pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha';

2. Bahwa upah Penggugat diberikan berdasarkan hasil kerja borongan yang diperjanjikan antara Tergugat I dengan Tergugat II sedangkan kegiatan Long March (jalan kaki) ke Jakarta yang dilakukan oleh Penggugat pada bulan Februari sampai dengan Maret 2017 bukan merupakan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang-undang tersebut diatas dan bukan juga kegiatan 'Mogok Kerja' sehingga tuntutan Penggugat terhadap gaji (upah) bulan Februari dan Maret 2017 tidak beralasan serta tidak berdasarkan hukum dan mohon Majelis Hakim yang mulia menolaknya;

TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK BERDASARKAN HUKUM

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 9 (sembilan) petitum angka 13 (tiga belas) dimohonkan oleh Penggugat untuk 'Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) / hari atas kelalaiannya melaksanakan putusan ini';
2. Bahwa petitum mengenai uang paksa (dwangsom) tersebut, menunjukkan gugatan a quo bermakna selain mempersoalkan masalah hubungan Industrial sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ternyata Penggugat juga telah mengajukan tuntutan diluar sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang dimaksud;
3. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maupun peraturan pelaksana ketenagakerjaan lainnya, tidak ada mengatur tentang adanya uang paksa (dwangsom);
4. Bahwa kemudian berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. No.791K/Sip/1972, maka dinyatakan bahwa : "Uang Paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar gaji", dimana dalam gugatan a quo Penggugat telah meminta pembayaran gaji

Halaman 26 dari 52
Putusan PHI Nomor :282/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



bulan Februari dan Maret 2017 sehingga mohon Majelis Hakim yang mulia menolak tuntutan Penggugat tersebut;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian argumentasi yuridis diatas, telah cukup alasan bagi Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard);

“Atau apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (naar gode justitie recht doen)”;

Demikian Eksepsi dan Jawaban Tergugat II diajukan semoga Majelis Hakim yang mulia dapat mengabulkannya, Terima kasih;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat III telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 7 Desember 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa tegugat III menerima penggugat untuk bekerja pada tergugat III dari tergugat II sesuai dengan berita acara tanggal 17 April 2017;
2. Bahwa tegugat III menerima sebahagian pekerjaan dari tergugat I berdasarkan perjanjian Nomor : HK45/1/20/BICT-17.TU tanggal 14 April 2017;
3. Bahwa tergugat III mempekerjakan penggugat sebagai tenaga kerja untuk melaksanakan pekerjaan yang diterima oleh tergugat III dari tergugat I.
4. Bahwa penggugat telah bekerja pada tergugat III terhitung mulai tanggal 22 April 2017 dan tergugat III telah memenuhi kewajibannya kepada penggugat berupa pembayaran upah/gaji, BPJS Tenaga Kerja, dan BPJS Kesehatan sejak bulan April 2017 sampai dengan saat ini;

Bahwa berdasarkan jawaban tergugat III tersebut diatas, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;

“Atau apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Demikian jawaban tergugat III diajukan semoga Majelis Hakim yang mulia dapat mengabulkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena isi gugatan Penggugat disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg

Halaman 27 dari 52
Putusan PHI Nomor :282/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan kewajiban dari Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu P-1 s/d P-62;

1. Bukti P-1 Foto copy surat Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara No. 101/KORWIL.SBSI/SUMUT/S.KEL/I/2016 Perihal Undangan Bipartid tanggal 06 januari 2016;
2. Bukti P-2 Foto copy surat Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara No. 102/KORWIL.SBSI/SUMUT/S.KEL/I/2016 Perihal Undangan Bipartid II tanggal 14 Januari 2016;
3. Bukti P-3 Foto copy surat Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara No. 101-A/KORWIL.SBSI/SUMUT/S.KEL/I/2016 Perihal Undangan Bipartid tanggal 06 januari 2016;
4. Bukti P-4 Foto copy surat Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara No. 102-A/KORWIL.SBSI/SUMUT/S.KEL/I/2016 Perihal Undangan Bipartid II tanggal 14 Januari 2016;
5. Bukti P-5 Foto copy surat Komando Inti Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KOTI DPC SBSI) Kota Medan No. 0103/KOTI/DPC SBSI/Mdn/II/2016 Perihal Pemberitahuan tanggal 01 Februari 2016;
6. Bukti P-6 Foto copy surat PK SBSI KOPKARPEL UPTK BELAWAN-PELINDO 1 No. 37/PK/SBSI/Su/S.Kel/III/2016 Perihal Pemberitahuan Aksi Mogok tanggal 07 Maret 2016;
7. Bukti P-7 Foto copy surat Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara No. 236/KORWIL.SBSI/SUMUT/S.KEL/III/2016 Perihal Pengaduan/Pelimpahan tanggal 07 Maret 2016;
8. Bukti P-8 Foto copy surat Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara No. 258/KORWIL.SBSI/SUMUT/S.KEL/Sept/2016 Perihal Mohon Penegakan Hukum tanggal 20 September 2016;

Halaman 28 dari 52
Putusan PHI Nomor :282/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 Foto copy surat Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara No. 259/KORWIL. SBSI/SUMUT/S.KEL/Sept/2016 Perihal Mohon Penegakan Hukum tanggal 20 September 2016;
10. Bukti P-10 Foto copy surat Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara No. 260/KORWIL. SBSI/SUMUT/S.KEL/Sept/2016 Perihal Mohon Penegakan Hukum tanggal 20 September 2016;
11. Bukti P-11 Foto copy surat Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara No. 261/KORWIL. SBSI/SUMUT/S.KEL/Sept/2016 Perihal Mohon Penegakan Hukum tanggal 20 September 2016;
12. Bukti P-12 Foto copy surat Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara No. 262/KORWIL. SBSI/SUMUT/S.KEL/Sept/2016 Perihal Klarifikasi & Permintaan Tindak Lanjut Pengaduan tanggal 20 September 2016;
13. Bukti P-13 Foto copy surat Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara No. 263/KORWIL. SBSI/SUMUT/S.KEL/Sept/2016 Perihal Mohon Penegakan Hukum tanggal 20 September 2016;
14. Bukti P-14 Foto copy surat Divisi Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara (KORWIL SBSI PROVSU) No.071/KHH.KORWIL.SBSI/SUMUT/S.KEL/Sept/2016 Perihal Saksi PT. PELINDO 1 tanggal 20 September 2016;
15. Bukti P-15 Foto copy surat Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara No.99/KORWIL. SBSI/SUMUT/II/2017 Perihal Pemberitahuan;
16. Bukti P-16 Foto copy surat Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara No.110/EKST/KORWIL. SBSI/SUMUT/II/2017 Perihal Kinerja Pengawas/PPNS tanggal 25 Januari 2017;
17. Bukti P-17 Foto copy surat Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara No. 21/EKST/KORWIL.

Halaman 29 dari 52
Putusan PHI Nomor :282/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SBSI/SUMUT/II/2017 Perihal Protes & Keberatan tanggal 2 Februari 2017;

18. Bukti P-18 Foto copy surat Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara No.1011/KORWIL.

SBSI/SUMUT/S.KEL/II/2017 Perihal Klarifikasi & Bertemu tanggal 07 Februari 2017;

19. Bukti P-19 Foto copy surat Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara No.140/KORWIL.

SBSI/SUMUT/S.KEL/II/2017 Perihal Peringatan & Penegasan tanggal) 7 Februari 2017;

20. Bukti P-20 Foto copy surat Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara No.143/KORWIL.

SBSI/SUMUT/S.KEL/II/2017 Perihal Peringatan & Penegasan tanggal 07 Februari 2017;

21. Bukti P-21 Foto copy surat Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara No. A.1000/KORWIL.

SBSI/SUMUT/I/2017 Perihal Pemberitahuan;

22. Bukti P-22 Foto copy surat Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia No. 105/DPP SBSI/II/2017 Perihal

Pemberitahuan Aksi tanggal 23 Februari 2017;

23. Bukti P-23 Foto copy surat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Intelijen Keamanan No. 339/III/2017/

Baintelkam Perihal Pengajuan Surat Permohonan Izin tanggal Maret 2017;

24. Bukti P-24 Foto copy surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tanggal 08 Maret 2017;

25. Bukti P-25 Foto copy surat Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara No. 100.A/KORWIL.

SBSI/SUMUT/S.KEL/V/2017 Perihal Undangan Bipartid I tanggal 13 Mei 2017;

26. Bukti P-26 Foto copy surat Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara No. 101.A/KORWIL.

SBSI/SUMUT/S.KEL/V/2017 Perihal Undangan Bipartid tanggal 30 Mei 2017;

27. Bukti P-27 Foto copy surat Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara No. 406/KORWIL.

Halaman 30 dari 52

Putusan PHI Nomor :282/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SBSI/SUMUT/S.KEL/VI/2017 Perihal
Pengaduan/Pelimpahan tanggal 07 Juni 2017;
28. Bukti P-28 Foto copy surat Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan No. 567/1773/DKKM/2017 Perihal Anjuran tanggal 21 Juli 2017;
29. Bukti P-29 Foto copy surat Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara No. 1817-7/DTK/SU/2017 Perihal Penjelasan tanggal 21 Agustus 2017;
30. Bukti P-30 Foto copy surat Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan No. 1173/SP-SB/DSTKM/2016 Perihal Tanda Bukti Pencatatan tanggal 27 Januari 2016;
31. Bukti P-31 Foto copy surat Pengurus Komisariat serikat Buruh Sejahtera Indonesia PT.Pelindo /Kopkarpel UTPK Belawan No.021/PK.SBSI/KOPKARPEL/S.KEL/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 Perihal pemberitahuan aksi mogok kerja dan aksi unjuk rasa;
32. Bukti P-32 Foto copy surat Kepolisian Daerah Sumatera utara No.B/700/II/2016/DITINTELKAM tanggal febuari 2016 Perihal pemberitahuan tidak diterbitkan-nya surat tanda terima pemberitahuan;
33. Bukti P-33 Foto copy surat Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara No.106/KORWIL. SBSI/SUMUT/II/2017 tanggal 16 januari 2017 Perihal pemberitahuan;
34. Bukti P-34 Foto copy surat Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara No.19/KORWIL. SBSI/SUMUT/s.kel/feb/2017 tanggal 28 Febuari 2017 Perihal penegakan hukum;
35. Bukti P-35 Foto copy surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik indonesia No.1.404/SPPP/XI/2016 tanggal 2 November 2016 Perihal permohonan informasi dan kelengkapan berkas;
36. Bukti P-36 Foto copy surat kementerian ketenagakerjaan Republik Indonesia (Direktorat jenderal pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja) tanggal 24 oktober 2016 Perihal permohonan penegakan hukum;

Halaman 31 dari 52
Putusan PHI Nomor :282/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti P-37 Foto copy Surat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor : B-4993/Kemensetneg/D-2/SR.02/10/2016 tanggal 17 oktober 2016 Perihal permohonan penyelesaian permasalahan hubungan industrial;
38. Bukti P-38 Foto copy surat Dewan Pengurus Pusat Serikat buruh Sejahtera Indonesia No.A.115/DPP.SBSI/III/2017 tanggal 09 maret 2017;
39. Bukti P-39 Foto copy surat keputusan Dewan Pengurus Cabang Serikat buruh Sejahtera Indonesia Kota Medan No.30.SK/DPC.SBSI/K.MDN/XII/2015 tanggal 01 Desember 2015 Tentang Pengurus komisariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia PT.Pelindo 1/Kopkarpel UTPK Belawan;
40. Bukti P-40 Foto copy surat Sekretariat Jenderal dan badan keahlian dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia No.DA/16363/SETJEN DPR RI/HK.02/9/2017 tanggal 13 september 2017;
41. Bukti P-41 Foto copy surat Kepolisian Daerah Sumatera utara (resor Pelabuhan Belawan) No.B/1761/I/2017 tanggal Januari 2017 Perihal undangan;
42. Bukti P-42 Foto copy Surat Dinas sosial dan tenaga kerja kota Medan No.560/503/DSTKM/2016 tanggal 27 September 2016 Perihal panggilan;
43. Bukti P-43 Foto copy surat Kepolisian Daerah Sumatera utara (resor Pelabuhan Belawan) No.B/116/I/2017 tanggal Januari 2017 Perihal undangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-44, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa alat bukti tersebut tidak pernah diajukan dalam persidangan perkara aquo;

44. Bukti P-45 Foto copy Surat Keputusan Direksi PT.Pelabuhan Indonesia 1 (persero) No. KP.31/8/20/PI-15.TU tanggal 17 April 2015 Perihal Nilai jabatan pada jabatan Struktural dan Non Struktural di Lingkungan PT.Pelabuhan Indonesia 1 (persero);

Halaman 32 dari 52
Putusan PHI Nomor :282/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bukti P-46 Foto copy Surat Kopkarpel UTPK No. 055 /S Ket/kop-UTPK/III/2017 tanggal 10 maret 2017 Perihal Surat Keterangan;
46. Bukti P-47 Foto copy Surat Dinas tenaga kerja provinsi Sumatera Utara No.25/DTK/PPNS/2017 tanggal maret 2017 Perihal Surat Panggilan atas nama.Herry Mulyawan;
47. Bukti P-48 Foto copy Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Kopkarpel Unit UTPK Belawan Pada Rapat anggota Tahunan (Tahun Buku 2014);
48. Bukti P-49 Foto copy Nota Dinas Nomor 1184 /UM/X/13 tanggal 30 oktober 2013 perihal perjanjian pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja di BICT;
49. Bukti P-50 Foto copy Surat Keputusan Kopkarpel UTPK Belawan tentang penetapan dan pengangkatan karyawan kopkarpel UTPK tanggal 27 Mei 2016 An. Dedi Handoko SE;
50. Bukti P-51 Foto copy Slip Gaji Dedi Handoko SE., Bulan Maret 2002 yang diterbitkan tergugat 2;
51. Bukti P-52 Foto copy KTA SBSI atas nama Dedi Handoko SE;
52. Bukti P-53 Foto copy Kartu Jamsostek yang diterbitkan PT. Jamsostek a.n Dedi Handoko SE;
53. Bukti P-54 Foto copy Buku Tabungan BRI No. rekening 1008466404 yang diterbitkan PT.bank Rakyat indonesia atas nama Dedi handoko;
54. Bukti P-55 Foto copy Buku Tabungan BNI No. rekening 0386667746 yang diterbitkan PT. Bank Negara Indonesia atas nama Dedi Handoko;
55. Bukti P-56 Foto copy Kartu Identify card ISPS CODE yang diterbitkan PT.Pelabuhan Indonesia 1 (persero) atas nama Dedi handoko SE;
56. Bukti P-57 Foto copy Kartu Tally yang diterbitkan Kopkarpel UTPK Belawan atas nama Dedi Handoko SE;
57. Bukti P-58 Foto copy Kartu Maritime Security pass yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2009 yang diterbitkan Kopkarpel UTPK Belawan a.n Dedi handoko SE;

Halaman 33 dari 52
Putusan PHI Nomor :282/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Bukti P-59 Foto copy Kartu Tanda Masuk Pelabuhan Belawan A 2014 yang diterbitkan Kopkarpel UTPK Belawan atas nama Dedi handoko SE;
59. Bukti P-60 Foto copy Kartu Tanda Peserta Seleksi penerimaan calon pegawai PT.Pelabuhan Indonesia 1 (persero) yang diterbitkan LMFEUI dan PT.pelabuhan Indonesia 1 (persero) atas nama Dedi Handoko;
60. Bukti P-61 Foto copy Piagam penghargaan Yang diterbitkan PT.Pelabuhan Indonesia 1 (persero) tanggal 18 januari 2013 atas nama Dedi handoko sebagai Tallyman Peringkat pertama di tahun 2012;
61. Bukti P-62 Print Out buku laporan Tahun 2016 PT. Pelindo 1 (Persero);

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan, kecuali bukti P-6, P-38, P-43, P-45, P-46, P-48, P-49 dan P-62, aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan, sehingga alat bukti tersebut hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti jika bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat mengajukan 23 (dua puluh tiga) orang saksi yakni Arsula Gultom, Bagus Kurniawan, Fridolf John R,SE, M. Irfansyah, M. Oktavianto, Suryanto, Susilo, Rahmad Riadi, Bonafindo Siagian, Johanda Simatupang, Ricky Marbun, Hamdan Lubis, Muhammad Luthfy Panjaitan, Feri Irawan Azmy, Taufik Hidayat Lubis, Muhammad Nuh, Robinson Marbun, Andrian, Danianto Saragih, Suharno, Nurdin, David Jasman Sembiring dan Joko dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya pihak Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat yaitu T-I-1 s/d T-I-9, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-I-1 Foto copy Perjanjian No B.XIV-29/BICT-KP.31 tanggal 09 September 2016 yaitu jasa pendorongan pekerjaan tally/stevedore pada Belawan Internasional Container Terminal;
2. Bukti T-I-2 Foto copy printout Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2012 tentang Syarat-syarat

Halaman 34 dari 52
Putusan PHI Nomor :282/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;

3. Bukti T-I-3 Foto copy Surat General Manager Belawan International Container Terminal No. KP.30/29/6/BICT-13 tanggal 24 Desember 2013 perihal Pelaporan Jenis Pekerjaan Penunjang Dalam Pemborongan Pekerjaan;
4. Bukti T-I-4 Foto copy Bukti Pelaporan Jenis Pekerjaan Penunjang No 560/141/DSTKM/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan;
5. Bukti T-I-5 Foto copy Keputusan Direksi No KP.30/22/I/PI-16.TU tanggal 01 Juli 2016 tentang Tata Cara Rekrutmen dan Seleksi Penerimaan Pegawai PT Pelindo I;
6. Bukti T-I-6 Foto copy printout website <http://www.lmfeui.com/oscpelindo1/> PENGUMUMAN SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) TAHUN 2016 BAGI TENAGA KERJA OUTSOURCING DI LINGKUNGAN PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO);
7. Bukti T-I-7 Foto copy printout PENGUMUMAN : 23 JUNI 2016 dari website <http://www.lmfeui.com/oscpelindo1/>. PESERTA YANG BERHAK MENGIKUTI REGISTRASI DAN TES TERTULIS SELEKSI CALON PEGAWAI PT PELABUHAN INDONESIA 1 (KHUSUS OUTSOURCING);
8. Bukti T-I-8 Foto copy printout dari website <http://www.lmfeui.com/oscpelindo1/> PENGUMUMAN : 14 Februari 2017 PENGUMUMAN PESERTA LULUS TAHAP PEMERIKSAAN KESEHATAN (Khusus Outsourcing) SELEKSI CALON PEGAWAI PT. PELINDO 1 (PERSERO);
9. Bukti T-I-9 Foto copy Perjanjian antara PT Pelindo I dan Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia N No KP.30/14/15/PI-16.TU tanggal 23 Juni 2016 tentang Rekrutmen Calon Pegawai PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan, kecuali bukti T-I-2, T-I-6, T-I-7 dan T-I-8, aslinya

Halaman 35 dari 52
Putusan PHI Nomor :282/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



tidak dapat diperlihatkan dipersidangan, sehingga alat bukti tersebut hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti jika bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Tergugat I mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Natasha Anindita dan Djuhaery, dibawah sumpah menurut agamanya yang menerangkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya pihak Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat yaitu T-II-1 s/d T-II-9, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-II-1 Foto copy Surat Izin Operasional Penyedia Jasa Pekerja / Buruh Nomor : 560/372/DSTKM/2010 ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2010 oleh Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan;
2. Bukti T-II-2 Foto copy Surat Keputusan Badan Pengurus Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (AsBUPI) No. HK.56/1/1/AsBUPI-13 tentang penetapan alur proses bisnis, pekerjaan pokok dan penunjang di lingkungan badan usaha pelabuhan Indonesia ditetapkan pada tanggal 11 Desember 2013 oleh badan pengurus Asosiasi badan usaha pelabuhan Indonesia;
3. Bukti T-II-3 Foto copy bukti pelaporan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan kepada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. 560/141/DSTKM/2013, yang ditetapkan di Medan pada tanggal 27 Desember 2013;
4. Bukti T-II-4 Foto copy pernyataan kesepakatan bersama yang dilakukan oleh Kopkarpel UTPK Belawan, Perwakilan Buruh koperasi karyawan Pelindo I (Kopkarpel) UTPK Belawan, PT. Pelindo I, dan DPP PK SBSI, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2017;
5. Bukti T-II-5 Foto copy surat keterangan tentang pemberitahuan tidak bekerja lagi dari koperasi karyawan Pelindo I (Kopkarpel) UTPK Belawan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Medan yang ditetapkan di Medan pada tanggal 10 Maret 2017;



6. Bukti T-II-6 Foto copy berita acara rapat tentang pembahasan alokasi penempatan tenaga kerja outsourcing eks koperasi karyawan Pelindo I (Kopkarpel) UTPK Belawan yang di Mandiri University Medan pada tanggal 4 April 2017;
7. Bukti T-II-7 Foto copy notulen rapat tentang pengalokasian tenaga kerja eks koperasi karyawan Pelindo I (Kopkarpel) UTPK Belawan antara koperasi karyawan Pelindo I (Kopkarpel) UTPK Belawan dengan pengurus komisariat SBSI UTPK Belawan disaksikan oleh PT. Pelindo I (Persero) yang ditetapkan di Belawan pada tanggal 10 April 2017;
8. Bukti T-II-8 Foto copy notulen rapat tentang pengalokasian tenaga kerja eks koperasi karyawan Pelindo I (Kopkarpel) UTPK Belawan pada tanggal 12 April 2017;
9. Bukti T-II-9 Foto copy notulen rapat tentang pengalokasian tenaga kerja eks koperasi karyawan Pelindo I (Kopkarpel) UTPK Belawan pada tanggal 17 April 2017;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan, kecuali bukti T-II-2, T-II-3, T-II-4, T-II-5 dan T-II-6 aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan, sehingga alat bukti tersebut hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti jika bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya pihak Tergugat III telah mengajukan alat bukti surat yaitu T-1 s/d T-4, dan tidak menghadirkan saksi dalam perkara a quo yaitu :

1. Bukti T-III-1 Foto copy Perjanjian Nomor : HK.45/1/20/BICT-17.TU tanggal 19 April 2017 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Gate Inspector, Solo dan Trafficman antara PT. Pelindo I BICT dan PT. Garda Parahiangan;
2. Bukti T-III-2 Foto copy Bukti Pembayaran gaji bulan Oktober 2017 an. Dedi Handoko;
3. Bukti T-III-3 Foto copy Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, bulan Oktober 2017;
4. Bukti T-III-4 Foto copy Bukti Pembayaran lembur hari besar bulan September 2017 dan pemberian Extra Fooding bulan Juli 2017;



Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kesimpulan pada tanggal 05 Februari 2018, sedangkan Tergugat III tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan dalam perkara ini dan selanjutnya memohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dicatat dalam berita acara persidangan dianggap seluruhnya merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat I, dan Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang bukan tentang Kompetensi Absolut maupun Kompetensi Relatif sehingga dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Gugatan Penggugat Kabur (Obscur libel):

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugat kabur adalah bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas tentang perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I yang melanggar Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga mengajukan eksepsi mengenai gugatan kabur yaitu dalil gugatan Penggugat saling bertentangan dalam satu sisi menyatakan tindakan Tergugat II melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dalam dalil lainnya menyatakan bahwa tindakan Tergugat II yang melakukan pengalihan hubungan kerja kepada Tergugat III bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terkait dengan pihak yang ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara aquo dan kumulasi gugatan perdata biasa dengan gugatan perselisihan hubungan industrial yang dilakukan oleh Penggugat tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur, adapun hal ini didasari hubungan kerja yang berlangsung antara Penggugat dengan

Halaman 38 dari 52
Putusan PHI Nomor :282/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



para Tergugat adalah memiliki hubungan hukum sebagai pemberi pekerjaan dalam hal ini PT. Pelindo I, sehingga gugatan Penggugat yang menarik beberapa pihak dalam perkara aquo tidak menjadi kabur, selain itu bahwa kumulasi gugatan Penggugat dalam praktek pemeriksaan perkara perselisihan hubungan industrial adalah hal yang lazim berlaku dalam hukum acara Pengadilan Hubungan Industrial, sebagaimana juga diatur dalam ketentuan pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu : "Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang diatur secara khusus dalam undang undang ini";

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II terkait eksepsi gugatan kabur (obscuur liber), Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II ternyata telah memasuki bagian dari pokok perkara yang harus diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II mengenai gugatan kabur (obscuur libel) haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka mutatis mutandis pertimbangan Majelis Hakim dalam bagian eksepsi adalah juga merupakan bagian dari pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat I, II, dan Tergugat III, maka dapat disimpulkan bahwa persoalan pokok antara Penggugat dengan Tergugat I adalah bahwa Penggugat bekerja dibidang produksi Tergugat I tepatnya diareal Pelabuhan Belawan melalui Tergugat II, Penggugat mulai kerja sejak tanggal 01 Mei 2000 dan jabatan terakhir sebagai Tally Lapangan dengan menerima upah Rp.3.421.255,00,- (tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), secara tiba tiba pada akhir bulan Desember 2016 Tergugat I melalui Tergugat II mengumumkan kepada Penggugat bahwa sejak awal tahun 2017 akan dipindahkan ke perusahaan lain dan bagi yang menolak tidak dapat lagi bekerja;



Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya mengajukan bantahan yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat I menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan penunjang yang salah satunya adalah pemborongan pekerjaan Tally pada BICT kepada Tergugat II terakhir dengan perjanjian Nomor : B.XIV-29/BICT-KP.31 tanggal 09 September 2016 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (alat bukti T.1-1), Penggugat adalah merupakan pekerja dari Tergugat II dan menerima upah serta hak hak lainnya dari Tergugat II, maka jelas dan terang bahwa tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat, sehingga seharusnya gugatan ini tidak diajukan pada Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II menolak seluruh dalil dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II yaitu bahwa benar Penggugat adalah ex pekerja pada Tergugat II yang ditempatkan pada areal Pelabuhan Belawan Unit Peti Kemas, Penggugat diterima bekerja pada Tergugat II atas lamaran secara lisan sesuai kebutuhan Tergugat II yang mendapatkan pekerjaan borongan dari Tergugat I, kemudian Tergugat II menawarkan solusi pengalihan Penggugat kepada Perusahaan lain yang telah mendapatkan borongan pekerjaan dari Tergugat I serta memberikan uang pisah sesuai kemampuan keuangan Tergugat II, selain itu Penggugat tetap mendapatkan fasilitas maupun upah yang sama, akan tetapi Penggugat tidak menerima solusi yang ditawarkan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat I, II, dan Tergugat III tersebut di atas, maka persoalan hukum yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah Penyerahan sebagian Pekerjaan Tergugat I kepada Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ?
2. Dan selanjutnya apakah tindakan pengalihan hubungan kerja Penggugat oleh Tergugat II (Ic. Koperasi Karyawan Pelabuhan UPTK Belawan) kepada Tergugat III (Ic. PT. Mardiah Abadi Sentosa) demi hukum dapat berubah menjadi hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I (Ic. PT. Pelabuhan Indonesia I) ?

Menimbang, bahwa oleh karena isi gugatan Penggugat disangkal kebenarannya oleh Tergugat I, II, dan Tergugat III, maka sesuai pasal 283 RBg juncto 1865 KUH-Perdata Majelis Hakim terlebih dahulu membebaskan pembuktian kepada Penggugat, dan selanjutnya Tergugat I, II, dan Tergugat III;



Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya tersebut pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-59 dan menghadirkan 23 (dua puluh tiga) orang saksi yakni Arsula Gultom, Bagus Kurniawan, Fridolf John R,SE, M. Irfansyah, M. Oktavianto, Suryanto, Susilo, Rahmad Riadi, Bonafindo Siagian, Johanda Simatupang, Ricky Marbun, Hamdan Lubis, Muhammad Luthfy Panjaitan, Feri Irawan Azmy, Taufik Hidayat Lubis, Muhammad Nuh, Robinson Marbun, Andrian, Danianto Saragih, Suharno, Nurdin, David Jasman Sembiring dan Joko dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I dalam mempertahankan dalil-dalil sangkalannya juga telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Natasha Anindita dan Djuhaery yang di bawah sumpah menerangkan di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II dalam mempertahankan dalil-dalil sangkalannya juga telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-9 dan tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat III (Ic. PT. Garda Parahiangan) dalam mempertahankan dalil-dalil sangkalannya juga telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.III-1 sampai dengan T.III-4 dan tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat bukti tersebut, baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, maka yang akan diperiksa dan dipertimbangkan hanyalah yang ada relevansinya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan hubungan industrial tersebut telah diupayakan perundingan mediasi, sehingga terbit Anjuran dari Mediator pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Nomor 567/1773/DKKM/2017 tanggal 21 Juli 2017 dan oleh karena Tergugat I, II, dan Tergugat III masih belum menerima anjuran dimaksud, kemudian perselisihan ini dilanjutkan oleh Penggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka anjuran dari pegawai Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Nomor 567/1773/DKKM/2017 tanggal 21 Juli 2017 adalah merupakan syarat pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

*Halaman 41 dari 52
Putusan PHI Nomor :282/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn*



Medan, dan setelah Majelis Hakim meneliti isi Anjuran dari Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Nomor 567/1773/DKKM/2017 tanggal 21 Juli 2017 tersebut, maka dapat diketahui pihak Penggugat selaku pekerja hadir dalam sidang mediasi sementara para Tergugat selaku Pengusaha tidak hadir, sehingga tidak ada penyelesaian permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut setelah dihubungkan dengan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat bekerja di Koperasi Karyawan Pelabuhan Indonesia /Kopkarpel UTPK Belawan yang merupakan lingkungan PT. Pelindo I;
2. Bahwa benar Penggugat bekerja sebagai tenaga kerja pada Kopkarpel UTPK Belawan (Ic. Tergugat II) mulai kerja sejak tanggal 01 Mei 2000 terakhir bekerja dibagian Tally Lapangan;
3. Bahwa benar Tergugat II merupakan penyedia jasa tenaga kerja ditempat Tergugat I dan saat ini Tergugat II tidak lagi memperoleh kontrak pemborongan pekerjaan penyediaan jasa tenaga kerja dari Tergugat I;
4. Bahwa benar Tergugat II, perwakilan pekerja dan Tergugat III (Ic. PT. Garda Parahiangan) telah melakukan pertemuan untuk pengalokasian pengalihan pekerja ex Kopkarpel (alat bukti T.II-6, T.II-7, T.II-8 dan T.II-9);
5. Bahwa benar saat ini Penggugat terdaftar sebagai pekerja pada Tergugat III dan merupakan pengalihan dari Tergugat II (alat bukti T.II-9);
6. Bahwa benar Tergugat III telah melakukan pembayaran upah sesuai UMK dan mendaftarkan Penggugat sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS;
7. Bahwa benar Penggugat merupakan anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia/SBSI yang melakukan aksi long march masih tetap bekerja dilingkungan Tergugat I dibawah naungan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (Ic. Tergugat III);
8. Bahwa benar terdapat bukti pernyataan kesepakatan bersama yang dibuat oleh Perwakilan Buruh Kopkarpel dan Ketua Kopkarpel UTPK Belawan (alat bukti P- 24 identik T.II-4);
9. Bahwa benar berdasarkan bukti T.II-2 terdapat bukti penetapan alur proses bisnis, pekerjaan pokok dan penunjang dilingkungan Badan Usaha Pelabuhan Indonesia yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (AsBUPI) Nomor : HK.56/1/1/AsBUPI-13 tanggal 11 Desember 2013;
10. Bahwa benar telah diadakan rapat pembahasan dan pengalokasian Tenaga Kerja Outsourcing Eks Kopkarpel (alat bukti T.II-6, T.II-7, T.II-8 dan T.II-9);



11. Bahwa benar sesuai alat bukti T.I-6, T.I-7, T.I-8 dan T.I-9 serta keterangan saksi Tergugat I yang bernama Natasha Anindita, bahwa PT. Pelindo I telah melakukan rekrutmen karyawan baru PT. Pelindo I, bekerjasama dengan Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LMFE-UI) dan pendaftaran melalui Website Tergugat I dan web LMFE-UI);
12. Bahwa benar seleksi penerimaan karyawan baru di lingkungan PT. Pelindo ada yang dikhususkan bagi pekerja outsourcing, yang masih maupun tidak aktif lagi bekerja di areal PT. Pelindo I (vide bukti T.I-6);
13. Bahwa benar sesuai bukti T.I-7 dan keterangan saksi Tergugat I atas nama Natasha Anindita, bahwa Penggugat ikut sebagai peserta seleksi untuk menjadi karyawan di perusahaan PT. Pelindo (Ic. Tergugat I);
14. Bahwa benar Tergugat I telah melakukan pelaporan jenis pekerjaan penunjang kepada Instansi Ketenagakerjaan (alat bukti T.I-3 identik T.II-2);
15. Bahwa tidak terdapat bukti Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) antara Penggugat dengan Tergugat I, II, dan Tergugat III;
16. Bahwa benar sesuai keterangan seluruh saksi Penggugat, pihak Kopkarpel (Ic. Tergugat II) ada menawarkan uang pisah kepada para buruh termasuk Penggugat uang pisah yang nilainya antara Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah),- s.d Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) tapi Penggugat tidak bersedia menerimanya;
17. Bahwa benar perselisihan ini telah pernah diupayakan penyelesaiannya melalui Mediasi di kantor Instansi Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Medan dan telah terbit Anjuran dari Mediator Nomor : 567/1773/DKKM/2017 tanggal 21 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan telah diatur di dalam ketentuan pasal 64, 65 dan 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang inti pokoknya penyerahan sebagian pekerjaan tersebut bukan merupakan pekerjaan pokok (core bussiness) dan sesuai amanat dari pasal 65 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dimana perubahan dan atau penambahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada pada Pasal 3 ayat (1), (2) Pasal 4 ayat (1), (2), (3), Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor 19 Tahun 2012 sebagai aturan normatif dan menjadi

Halaman 43 dari 52
Putusan PHI Nomor :282/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



pedoman bagi perusahaan pemborong pekerjaan serta perusahaan pemberi pekerjaan;

Menimbang, dalam jawabannya Tergugat I pada pokoknya mengakui bahwa Tergugat I merupakan Perusahaan pemberi kerja borongan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Tergugat II yaitu pekerjaan penunjang yang salah satunya adalah bagian Tally pada Belawan Internasional Container Terminal (BICT) dan dikategorikan sebagai pekerjaan penunjang;

Menimbang, bahwa Tergugat I sesuai dengan bukti T.I-3 telah melakukan pelaporan jenis pekerjaan penunjang kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan dengan melampirkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (AsBUPI) Nomor : HK.56/1/1/AsBUPI-13 tanggal 11 Desember 2013, yang pada pokoknya mengatur bahwa ternyata pekerjaan Tally Lapangan adalah termasuk kegiatan penunjang tidak langsung jasa kepelabuhan yang dapat diserahkan melalui pemborongan pekerjaan dan/atau kepada perusahaan penyedia jasa pekerjaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat fakta untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, sesuai alat bukti yang diajukan Tergugat I yang diberi tanda T.I-4 identik dengan bukti T.II-3 telah memberikan laporan kepada Instansi Ketenagakerjaan tentang jenis pekerjaan penunjang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I telah melakukan kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan mekanisme atau alur proses yang ditetapkan oleh Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (alat bukti T.I-3 identik bukti T.II-2);

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga kerja Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, maka secara eksplisit telah diatur dalam pasal 3 ayat (1), (2) bahwa yang menjadi persyaratan pemborongan pekerjaan adalah sebagai berikut :

Ayat (1) : Perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan.



Ayat (2) : Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama, baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan;
- b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan, dimaksudkan untuk member penjelasan tentang cara melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan standart yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan;
- c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan pendukung dan memperlancar kegiatan utama sesuai dengan alur kegiatan proses pelaksanaan yang ditetapkan oleh asosiasi sector usaha yang dibentuk sesuai peraturan perundang undangan.
- d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka alasan Tergugat I untuk menyerahkan sebagian pekerjaan pendukung kepada perusahaan pemborongan pekerjaan sebagai penyedia Jasa Tenaga Kerja dalam hal ini Tergugat II sesuai dengan alat bukti T.II-1 berupa izin operasional penyedia jasa pekerja/buruh yang diterbitkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan Nomor : 560/372/DSTKM/2010 tanggal 10 Agustus 2010 juncto Perjanjian Kerjasama Nomor : B.XIV-29/BICT-KP.31 tanggal 09 September 2016 (alat bukti T.I-1), adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya tindakan Tergugat II mengalihkan status hubungan kerja Penggugat kepada Tergugat III (Ic. PT. Garda Parahiangan), menurut pendapat Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto pasal 3 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatannya bahwa Penggugat terakhir bekerja sebagai pekerja dilingkungan PT. Pelindo I dibawah naungan

Halaman 45 dari 52
Putusan PHI Nomor :282/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Kopkar Pelindo (Ic.Tergugat II) dan bekerja dibagian Tally Lapangan, bersesuaian dengan keterangan saksi Arsula Gultom, Bagus Kurniawan, M. Irfansyah, M. Oktavianto, Susilo, Rahmad Riadi, Bonafindo Siagian, Johanda, Hamdan, M. Lofhi, Feri Irawan, Ricky Marbun, Feri Irawan, Taufik, M. Nuh, Robinson Marbun, Andrian, Suharno, Nurdin, David, dan Joko yang diajukan oleh Penggugat dimuka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat benar bekerja dibagian Tally Lapangan;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pekerjaan Tally Lapangan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengurus Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia, dan Tergugat I telah melaporkan jenis pekerjaan penunjang dalam pemborongan pekerjaan kepada instansi yang membidangi Ketenagakerjaan, yang dalam hal ini kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Medan (alat bukti T.I-3 identik dengan bukti T.II-3) fungsinya melaksanakan pencatatan dan konfirmasi bongkar barang non peti kemas dari kapal, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Penggugat yang ditempatkan pada bagian Tally Lapangan sesuai surat keputusan Badan Pengurus Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (AsBUPI) yang termasuk jenis pekerjaan pendukung yang dapat diberikan oleh pemberi kerja kepada Perusahaan Pemborongan Pekerjaan dan/atau Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan Perjanjian pemborongan Pekerjaan antara Tergugat I dengan Tergugat II telah berakhir pada bulan Desember 2016 yang disebabkan oleh karena Tergugat I tidak lagi melanjutkan perjanjian kerja dengan Tergugat II pasca diberlakukannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, sehingga Tergugat II berkewajiban untuk mengalihkan hubungan kerja Penggugat kepada perusahaan penyedia jasa atau pemborongan pekerjaan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya mengakui ada menawarkan uang pisah sesuai dengan kemampuan Tergugat II kepada Penggugat sebagaimana juga dibenarkan oleh saksi saksi Penggugat yang nilainya antara Rp.2.500,000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.7.000.000,00,- (tujuh juta rupiah) dan disamping itu juga Tergugat II menawarkan kepada Penggugat untuk dialihkan kepada perusahaan penyedia jasa tenaga kerja yang lain serta Penggugat menerima hak-hak sebagaimana

*Halaman 46 dari 52
Putusan PHI Nomor :282/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn*



biasanya diterima oleh Penggugat pada Tergugat II, namun Penggugat menolak tawaran pembayaran uang pisah yang diajukan oleh Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II yang diberi tanda T.II-9 berupa Berita Acara tentang pengalokasian tenaga kerja outsourcing eks Kopkarpel UTPK Belawan pada tanggal 17 April 2017 dan selanjutnya Tergugat III (lc. PT. Garda Parahiangan) menerima pengalihan Penggugat dari Tergugat I dan ternyata pada pertemuan tersebut juga turut dihadiri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi Penggugat, bahwa sampai dengan saat ini Penggugat masih tetap bekerja dilingkungan PT. Pelindo dibawah naungan PT. Garda Parahiangan (lc. Tergugat III), sebagai pengalihan dari Tergugat II, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah di Putuskan Hubungan Kerja oleh Tergugat I tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, serta memperhatikan bahwa Penggugat masih tetap bekerja dan pengalihan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 32 (1), (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, dengan ketentuan bahwa masa kerja Penggugat dari penyedia jasa pekerja/buruh sejak bekerja tanggal 01 Mei 2000 dalam hal ini Tergugat II harus tetap dianggap ada dan diperhitungkan oleh Tergugat III (lc. PT. Garda Parahiangan), sebagai perusahaan penyedia jasa yang menerima pengalihan Penggugat dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa jenis pekerjaan Penggugat adalah bagian dari pekerjaan penunjang sesuai dengan alur proses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh Asosiasi Badan Pengurus Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (AsBUPI) Nomor : HK.56/III/AsBUPI-13 tanggal 11 Desember 2013 (alat bukti T.II-2) dan telah pula dilaporkan oleh Tergugat I ke kantor Instansi Ketenagakerjaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan (alat bukti T.I-3 identik T.II-2), sehingga jenis pekerjaan dari Penggugat dibenarkan untuk diberikan kepada perusahaan pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa tenaga kerja;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan dengan seksama berdasarkan bukti yang diajukan oleh para pihak serta fakta fakta hukum yang ditemukan dimuka persidangan, maka pengalihan Penggugat oleh Tergugat II

Halaman 47 dari 52
Putusan PHI Nomor :282/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



kepada Tergugat III telah sesuai dengan prinsip dan norma yang berlaku dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa status hubungan kerja Penggugat dengan PT. Garda Parahiangan (Ic. Tergugat III) sebagai pengalihan dari Kopkarpelindo (Ic. Tergugat II), dengan demikian maka seluruh hak-hak normatif yang biasa diterima oleh Penggugat pada Tergugat II yang menjadi syarat syarat kerja harus dipenuhi dan beralih menjadi tanggung jawab Tergugat III;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan bukti T.I-9 yakni surat perjanjian rekrutmen calon pegawai PT. Pelabuhan Indonesia (Ic Tergugat 1) dengan Lembaga Management Fakultas Ekonomi Univesitas Indonesia, bahwa untuk menjadi calon Pegawai di PT. Pelindo I telah dilakukan dengan tahapan pengumuman rekrutmen bagi pekerja khusus outsourcing yang berada dilingkungan Pelindo I melalui website Tergugat I dan website Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Univesitas Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengikuti proses seleksi/rekrutmen calon pegawai diperusahaan PT. Pelindo I sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I yang diberi tanda T.I-6, T.I-7, T.I-8 dan keterangan saksi Tergugat I atas nama Natasha Anindita bahwa Penggugat gugur pada tahap Wawancara sehingga Penggugat tidak berhak untuk mengikuti seleksi tahap selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa hubungan kerja Penggugat beralih menjadi hubungan kerja dengan perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal ini PT. Pelindo I (selaku Tergugat I), menurut pendapat Majelis Hakim tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat point 2 tentang permohonan sita jaminan (conservatoir beslag), maka menurut Majelis Hakim belum cukup alasan menurut hukum sebagaimana diamanatkan dalam pasal 261 Rbg untuk mengabulkan permohonan ini sehingga tuntutan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan Surat Koperasi Karyawan Pelabuhan UTPK Belawan Nomor : 055/S.Ket/Kop-UPTK/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 (T-II-5), pada pokoknya bahwa surat tersebut adalah menerangkan tentang nama-nama karyawan yang sudah tidak bekerja lagi pada Kopkarpel UTPK Belawan,

Halaman 48 dari 52
Putusan PHI Nomor :282/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



dan dipergunakan untuk keperluan pengurusan pembayaran JHT para pekerja / buruh yang sebelumnya terdaftar pada Tergugat II dan oleh karena Tergugat II tidak dibenarkan lagi menjadi perusahaan pemborongan pekerjaan sebagai penyedia jasa tenaga kerja pasca disahkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain serta pengalihan tenaga kerja/ buruh eks Kopkarpel kepada beberapa perusahaan penyedia jasa tenaga kerja yang ditunjuk oleh Tergugat I, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat pada petitum point 3 dan 4, tidak berdasar untuk dikabulkan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa tidak terdapat cukup bukti menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat I, dan pengalihan hubungan kerja Penggugat dari Tergugat II kepada Tergugat III (Ic. PT. Garda Parahiangan) berdasar menurut hukum, dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum gugatan poin 5 dan 6 tidak berdasar hukum untuk dikabulkan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dipertimbangkan diatas tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa Penggugat dapat berstatus menjadi pekerja/buruh pada perusahaan Tergugat I (Ic. PT. Pelindo I) dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), maka tuntutan Penggugat pada petitum gugatan point 7 tidak berdasar menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan poin 8 yang meminta untuk menghukum Tergugat I (PT.Pelindo I) agar Menerbitkan Surat Pengangkatan Penggugat Sebagai Buruh dan ataupun pegawai Tergugat I (Ic. PT.Pelabuhan Indonesia 1) sejak putusan ini dibacakan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat tidak terdapat cukup bukti sebagai karyawan Tergugat I, maka tuntutan ini tidak berdasar menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum oleh karena Penggugat sampai dengan saat ini masih tetap bekerja pada Tergugat III (PT.Garda Parahiangan) dilingkungan perusahaan PT. Pelindo I (Tergugat I), yang merupakan peralihan yang dilakukan oleh Tergugat II pasca disahkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012, dan sejak peralihan segala perintah kerja sudah menjadi tanggungjawab Tergugat III dan bukan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, sehingga tuntutan petitum gugatan poin 9 tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dipertimbangkan diatas tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa Penggugat berstatus sebagai pekerja/buruh pada perusahaan Tergugat I (Ic. PT. Pelindo I) dan masa kerja Penggugat sejak mengawali hubungan kerja dengan Tergugat II dan Tergugat III diperhitungkan dan menjadi tanggungjawab Tergugat I, maka tuntutan petitum gugatan point 10 dan 11 tidak berdasar menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat angka 12 (duabelas) berupa permohonan agar menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 agar secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) perhari atas kelalaiannya melaksanakan isi putusan Ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap putusan perdata dapat pula disertai suatu dwangsom apabila hal tersebut memang diminta oleh Penggugat kecuali salah satunya yang ditetapkan dalam pasal 611 a ayat 1 (Rv) juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menentukan bahwa dwangsom dapat dijatuhkan oleh Hakim kecuali terhadap penghukuman pembayaran sejumlah uang karena pemenuhan penghukuman dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa, dengan demikian tuntutan ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil dalil gugatannya, dengan demikian maka gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat dibawah Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah),- maka berdasarkan ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya yang timbul dalam perkara aquo dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 13

Halaman 50 dari 52
Putusan PHI Nomor :282/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus pada hari Kamis, 08 Februari 2018 oleh Riana br Pohan, SH.,M.H, selaku Hakim Ketua, Nurmansyah, SH.,M.H dan Meilinus AGPH. Gulo,S.Kom, masing-masing Hakim Ad Hoc selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis 22 Februari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hj.Betty,SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat III ataupun Kuasanya.

Hakim Anggota

d.t.o.

Nurmansyah,SH.,MH.

d.t.o.

Meilinus AGPH.Gulo,S.Kom.

Hakim Ketua

d.t.o.

Riana br Pohan,SH,MH.

Panitera Pengganti

d.t.o.

Hj. Betty,SH.

Halaman 51 dari 52
Putusan PHI Nomor :282/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Ongkos-ongkos :

- Biaya panggilan : Rp. 400.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp. 411.000.- (empat ratus sebelas ribu rupiah)